

I. DAFTAR ISI

I. DAFTAR ISI.....	i
II. DAFTAR TABEL.....	iii
III. DAFTAR GAMBAR-GRAFIK.....	v
IV. DAFTAR LAMPIRAN	vi
V. KATA PENGANTAR.....	vii
VI. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	x
VII. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
VIII. NERACA.....	2
IX. LAPORAN OPERASIONAL.....	5
X. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
XI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	7
A. PENDAHULUAN	7
A.1. Informasi Umum tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah	7
A.2. Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan;	8
A.3. Landasan Hukum Pelaporan Keuangan	10
A.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan;	11
B. EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN	13
B.1. Ekonomi Makro	13
B.2. Kebijakan Fiskal/Keuangan.....	15
C. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	19
C.1. Indikator/Target Kinerja Keuangan	19
C.2. Pencapaian Target Kinerja Keuangan	21
C.3. Hambatan dan Kendala	22
C.4. Solusi dan Saran.....	22
D. KEBIJAKAN AKUNTANSI	24
D.1. Entitas Akuntansi	24
D.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan.....	25
D.3. Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Pelaporan Keuangan	25
D.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	29
E. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	30

E.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan	30
E.2. Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan	46
F. INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA	47
F.1. Penggantian Manajemen Pemerintahan selama tahun berjalan	47
G. PENUTUP	48

II. DAFTAR TABEL

Tabel B.1. Komposisi Anggaran dan Anggaran Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jawa Timur TA 2018	18
Tabel C.1. Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018	21
Tabel C.2. Komparasi Target dan Realisasi Pendapatan TA 2018.....	21
Tabel C.3. Komparasi Realisasi Pendapatan TA 2017 dan TA 2018	21
Tabel C.4. Target dan Realisasi Belanja BKD Prov Jatim TA 2018	22
Tabel E.1. Komposisi Anggaran Tahun 2018	30
Tabel E.2. Perbandingan Realisasi Pendapatan-LRA TA 2017-2018	30
Tabel E.3. Realisasi Per Jenis Belanja TA 2018	31
Tabel E.4. Perbandingan Realisasi Per Jenis Belanja TA 2018 dan TA 2017	31
Tabel E.5. Realisasi Belanja Menurut Unit Bidang TA 2018	32
Tabel E.6. Realisasi Belanja Menurut Program TA 2018.....	34
Tabel E.8. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017	34
Tabel E.9. Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2018 dan TA 2017	35
Tabel E.10. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017.....	36
Tabel E.11. Perbandingan Nilai Aset per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017	37
Tabel E.12. Perbandingan Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017	37
Tabel E.13. Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017	38
Tabel E.14. Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	38
Tabel E.15. Perbandingan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	39
Tabel E.16. Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	39
Tabel E.17. Perbandingan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	40
Tabel E.18. Perbandingan Aset tidak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	40
Tabel E.19. Perbandingan Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	41
Tabel E.20. Perbandingan Utang Beban per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	41
Tabel E.21. Perbandingan Nilai Ekuitas Per 31 Desember 2018 dan 2017.....	41
Tabel E.22 Perbandingan Nilai Rincian Ekuitas Per 31 Desember 2018 dan 2017	42
Tabel E.23. Rincian Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2018`	42
Tabel E.24. Perbandingan Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	42
Tabel E.25. Perbandingan Beban Operasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	43
Tabel E.26. Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	43
Tabel E.27. Perbandingan Beban Pegawai per Unit Bidang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017..	44

Tabel E.28. Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 201745

Tabel E.29. Perbandingan Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 201745

III. DAFTAR GAMBAR-GRAFIK

Gambar A.1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.....	8
Grafik B.1. Komponen Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur berdasarkan Pengeluaran	13
Grafik B.2. Penurunan Presentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa TImur periode Maret 2015 – Maret 2018	14
Grafik B.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa TImur periode Februari 2016 – Agustus 2018.....	14
Grafik B.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa TImur berdasarkan Jenis Pendidikan periode Februari 2016 – Agustus 2018.....	15

IV. DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I
- DAFTAR PIUTANG DAERAH
 - DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 - DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
 - DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
 - DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN
 - DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
 - DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
 - DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
 - DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DAN BERGULIR
 - DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
 - DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
 - DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
 - DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
 - DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
 - DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN, ESELON, DAN NON ESELON
- LAMPIRAN II
- FORMAT AK-18
 - FORMAT AK-31
 - FORMAT AK-31 B
 - FORMAT AK-31 C
 - FORMAT AK-29
 - FORMAT AK-26
 - FORMAT AK-23
- LAMPIRAN III
- BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DI GUDANG
 - DAFTAR DAN REKAP MUTASI ASET TETAP
 - DAFTAR DAN REKAP MUTASI ASET TIDAK BERWUJUD
 - DAFTAR DAN REKAP MUTASI ASET LAIN-LAIN
 - REKENING KORAN BIDANG PER 31 DESEMBER 2018

V. KATA PENGANTAR

Kami atas nama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur menyajikan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur; dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 berupa menyajikan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ini, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur secara operasional disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2018; dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

2. **Laporan Realisasi Anggaran** Tahun Anggaran 2018 memberikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi pendapatan sebesar **Rp21.362.400,00** atau **0 persen** dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD TA 2018. Sementara itu, realisasi belanja dan transfer sebesar **Rp46.655.692.471,00** atau **92,94 persen** dari yang dianggarkan dalam Perubahan APBD TA 2018, sehingga terdapat surplus/defisit anggaran sebesar **Rp46.634.330.071,00** dan Pembiayaan Neto terealisasi sebesar **Rp0,00** atau **0 persen**. Sehingga dari perangkaan tersebut terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar **Rp46.634.330.071,00**.
3. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih** menyajikan informasi tentang Saldo Anggaran Lebih Tahun 2018 sebesar **Rp0,00**.
4. **Neraca** menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2018. Dari neraca diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar **Rp7.739.962.143,00**, dan kewajiban adalah sebesar **Rp6.221.800,00**, sehingga ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp 7.733.740.343,00**.
5. **Laporan Operasional** menyajikan informasi tentang ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Dari laporan operasional diperoleh informasi bahwa pendapatan operasional adalah sebesar **Rp21.362.400,00**, Beban operasional adalah sebesar **Rp45.036.271.268,00**, Surplus/Defisit Kegiatan Operasional adalah sebesar **(Rp45.014.908.868,00)**, Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah sebesar **Rp0,00**, Surplus/Defisit Luar Biasa adalah sebesar **Rp0,00**, dan Surplus/Defisit LO adalah sebesar **(Rp45.014.908.868,00)**.
6. **Laporan Arus Kas** menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Dari Laporan Arus Kas tersebut diperoleh informasi bahwa saldo awal per 1 Januari 2018 sebesar **Rp0,00** dan Kenaikan/Penurunan Kas sampai dengan akhir Desember 2018

adalah sebesar **Rp0,00** , sehingga saldo Kas per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp0,00**.

7. **sLaporan Perubahan Ekuitas** menyajikan informasi tentang saldo ekuitas sebesar **Rp7.733.740.343,00**.
8. **Catatan atas Laporan Keuangan** dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu komponen penyusun Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang nantinya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan hasilnya merupakan tolok ukur kinerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh karenanya kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (stakeholders) laporan keuangan ini. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta tepat waktu sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ANOM SURAHNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630524 199803 1 001

VI. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; (iii) Laporan Operasional; (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, 15 Februari 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ANOM SURAHNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630524 199803 1 001

VII. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : (308) Kepegawaian

ORGANISASI : (0100) Badan Kepegawaian Daerah

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5(=4-3)	6
	PENDAPATAN DAERAH	0,00	21.362.400,00	21.362.400,00	0,00
11	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	21.362.400,00	21.362.400,00	0,00
114	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	0,00	21.362.400,00	21.362.400,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	21.362.400,00	21.362.400,00	0,00
	BELANJA	50.202.231.086,00	46.655.692.471,00	(3.546.538.615,00)	(7,06)
21	BELANJA OPERASI	46.922.704.086,00	43.505.820.621,00	(3.416.883.465,00)	(7,28)
211	BELANJA PEGAWAI	24.125.897.086,00	22.412.960.633,00	(1.712.936.453,00)	(7,10)
212	BELANJA BARANG DAN JASA	22.796.807.000,00	21.092.859.988,00	(1.703.947.012,00)	(7,47)
	BELANJA MODAL	3.279.527.000,00	3.149.871.850,00	(129.655.150,00)	(3,95)
222	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	2.804.527.000,00	2.676.524.250,00	(128.002.750,00)	(4,56)
223	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	400.000.000,00	398.932.600,00	(1.067.400,00)	(0,27)
226	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	75.000.000,00	74.415.000,00	(585.000,00)	(0,78)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(50.202.231.086,00)	(46.634.330.071,00)	3.567.901.015,00	7,11
	Sisa Lebih (Lebih) Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(50.202.231.086,00)	(46.634.330.071,00)	3.567.901.015,00	7,11

Surabaya, 15 Februari 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ANOM SURAHNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19630524 199803 1 001

VIII. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NERACA
per 31 Desember Tahun 2018 dan Tahun 2017

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017
AKTIVA		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00
Piutang Pajak Kendaraan di Air	0,00	0,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - BBNKB	0,00	0,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan di Air	0,00	0,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	0,00
Piutang Pajak Air Permukaan	0,00	0,00
Piutang Pajak Rokok	0,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00
Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	0,00	0,00
Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	0,00	0,00
Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta	0,00	0,00
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Jasa Giro	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bunga	0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	0,00	0,00
Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak	0,00	0,00

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017
Piutang Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Sewa	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Sewa	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Atas Kelebihan Muatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Pengolahan/Pembuangan Limbah	0,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Penerimaan Lain-Lain	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	3.704.800,00	21.177.585,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	3.704.800,00	21.177.585,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	16.907.449.393,00	14.475.075.143,00
Gedung dan Bangunan	1.012.813.800,00	613.881.200,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	203.977.400,00	203.977.400,00
Aset Tetap Lainnya	6.622.300,00	6.622.300,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(11.525.792.328,00)	(10.356.533.505,00)
JUMLAH ASET TETAP	6.605.070.565,00	4.943.022.538,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017
Aset Tidak Berwujud	698.930.778,00	723.358.614,00
Aset Lain-lain	432.256.000,00	432.256.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	1.131.186.778,00	1.155.614.614,00
JUMLAH AKTIVA	7.739.962.143,00	6.119.814.737,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	6.221.800,00	5.495.597,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.221.800,00	5.495.597,00
JUMLAH KEWAJIBAN	6.221.800,00	5.495.597,00
EKUITAS		
Ekuitas	(38.900.589.728,00)	(35.207.743.521,00)
Ekuitas	6.114.319.140,00	5.044.056.360,00
Surplus/Defisit - LO	(45.014.908.868,00)	(40.251.799.881,00)
Ekuitas SAL	0,00	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	46.634.330.071,00	41.322.062.661,00
JUMLAH EKUITAS	7.733.740.343,00	6.114.319.140,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	7.739.962.143,00	6.119.814.737,00

Surabaya, 15 Februari 2019
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ANOM SURAHNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630524 199803 1 001

IX. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Badan Kepegawaian Daerah

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

No.	Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	%
-	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>	-	-	-	-
1	PENDAPATAN - LO				
11	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
111	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	21.362.400,00	13.965.200,00	7.397.200,00	52,97
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	21.362.400,00	13.965.200,00	7.397.200,00	52,97
2	BEBAN				
21	BEBAN OPERASI - LO				
211	Beban Pegawai - LO	22.412.960.633,00	22.211.082.673,00	201.877.960,00	0,91
212	Beban Barang dan Jasa	21.111.058.976,00	16.753.543.007,00	4.357.515.969,00	26,01
213	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.512.251.659,00	1.301.139.401,00	211.112.258,00	16,23
	JUMLAH BEBAN OPERASI - LO	45.036.271.268,00	40.265.765.081,00	4.770.506.187,00	11,85
	SURPLUS / DEFISIT - LO	(45.014.908.868,00)	(40.251.799.881,00)	(4.763.108.987,00)	11,83

Surabaya, 15 Februari 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ANOM SURAHNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19630524 199803 1 001

X. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO	URAIAN	2018	2017
1	EKUITAS AWAL	6.114.319.140,00	4.167.823.812,00
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(45.014.908.868,00)	(40.251.799.881,00)
3	EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	46.634.330.071,00	41.322.062.661,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / PENYESUAIAN EKUITAS	0,00	876.232.548,00
5	EKUITAS AKHIR	7.733.740.343,00	6.114.319.140,00

Surabaya, 15 Februari 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ANOM SURAHNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19630524 199803 1 001

XI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

A.1. Informasi Umum tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, mengemban tugas dalam urusan kepegawaian yang berwenang dalam penyusunan kebijakan teknis terkait perencanaan dan pengadaan ASN, disiplin pegawai, kesejahteraan, administrasi kepegawaian, pengembangan karir, dan kelembagaan korps ASN.

Dalam melaksanakan peran yang telah disebut diatas, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kepegawaian. Adapun dalam melaksanakan tugasnya Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Jl. Jemur Andayani 1, Surabaya, Jawa Timur.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan dibantu oleh 6 (empat) Eselon III, 18 (delapan belas) Eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar A.1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

A.2. Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan;

Laporan keuangan disusun dan disajikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi bagi berbagai para pengguna. Informasi yang disajikan berupa posisi keuangan yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai keuangan, mengevaluasi kinerja suatu entitas dan oleh karena itu dibutuhkan laporan keuangan yang akuntabel.

Untuk merespon kebutuhan terhadap sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan kepada semua pihak maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut SAP, laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan serta dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai yang dapat mempengaruhi keputusan.

Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka

setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyajikan Laporan Keuangan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai entitas akuntansi wajib melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan anggarannya dalam bentuk Laporan Keuangan yang terdiri dari; 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 3. Neraca; 4. Laporan Operasional (LO); 5. Laporan Arus Kas; 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Maksud disusunnya laporan keuangan instansi pemerintah ini adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Lebih jelasnya laporan keuangan sebagai alat akuntabilitas dimaksudkan untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan serta bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Sedangkan tujuan disusunnya laporan keuangan antara lain untuk;

- a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

A.3. Landasan Hukum Pelaporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan, OPD berpedoman kepada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Adapun landasan hukum disusunnya laporan keuangan ini adalah;

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

A.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan;

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah sebagai berikut:

Bab I *Pendahuluan*

Menguraikan Gambaran Umum dan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan serta Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

Bab II *Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD*

Menguraikan situasi ekonomi makro di daerah setempat yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan program, dasar pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebijakan keuangan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan SKPD yang menggunakan dana APBD dalam tahun berjalan.

Bab III *Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan*

Menguraikan tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan serta memaparkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Bab IV *Kebijakan Akuntansi*

Memuat informasi mengenai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, serta menjelaskan tentang basis akuntansi dan basis pengukuran atas penyusunan laporan keuangan daerah.

Bab V *Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan*

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, dan laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Bab VI *Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan*

Memuat informasi tentang hal yang belum diinformasikan dalam bagian maupun dari laporan keuangan.

Bab VII *Penutup*

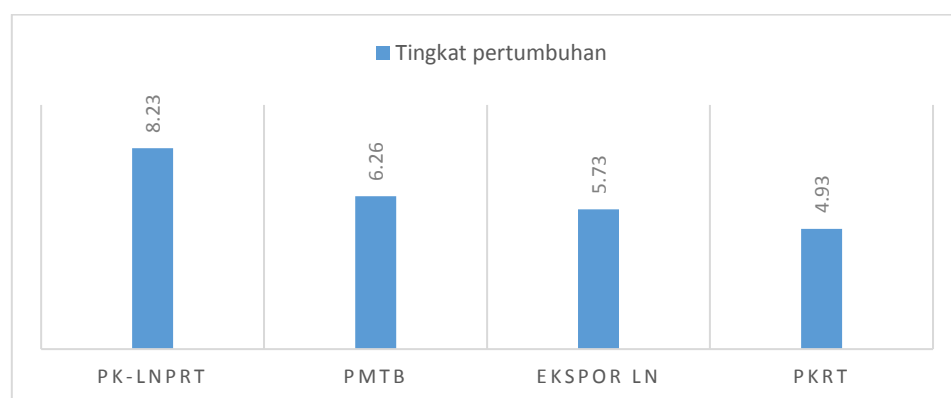
Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

B. EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN

B.1. Ekonomi Makro

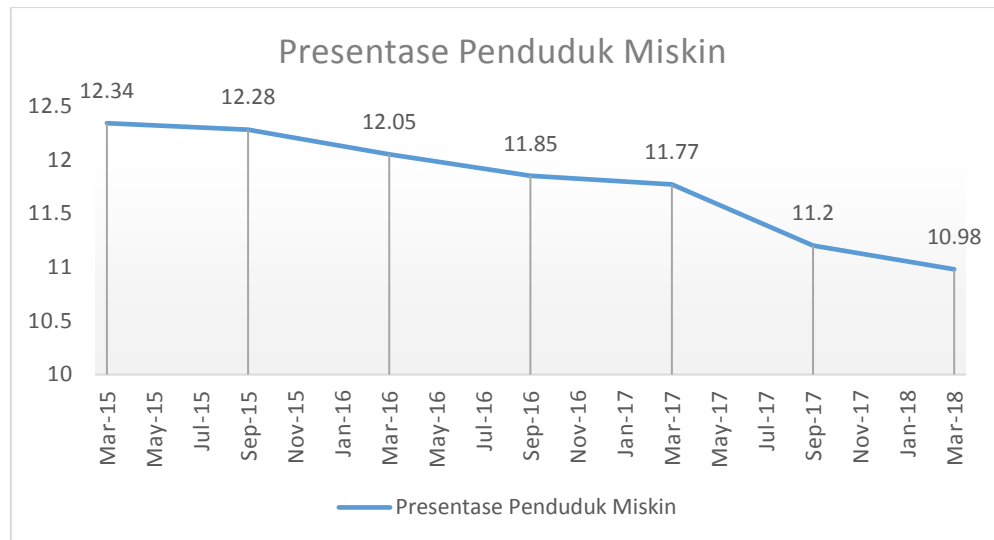
Untuk melihat indikasi keberhasilan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2018 Jawa Timur ditargetkan tumbuh sebesar 5,61 sampai 5,96 persen. Pada triwulan III 2018 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,4 persen, melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,59 persen. Hal ini merupakan pertumbuhan terendah selama 4 tahun terakhir, meskipun begitu pertumbuhan Jawa Timur pada Triwulan III 2018 masih lebih tinggi diatas rata-rata nasional.

Dilihat dari pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 8,23 persen, kemudian PMTB 6,26 persen, Ekspor Luar Negeri sebesar 5,73 persen, dan disusul oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4,93 persen.



Grafik B.1. Komponen Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur berdasarkan Pengeluaran

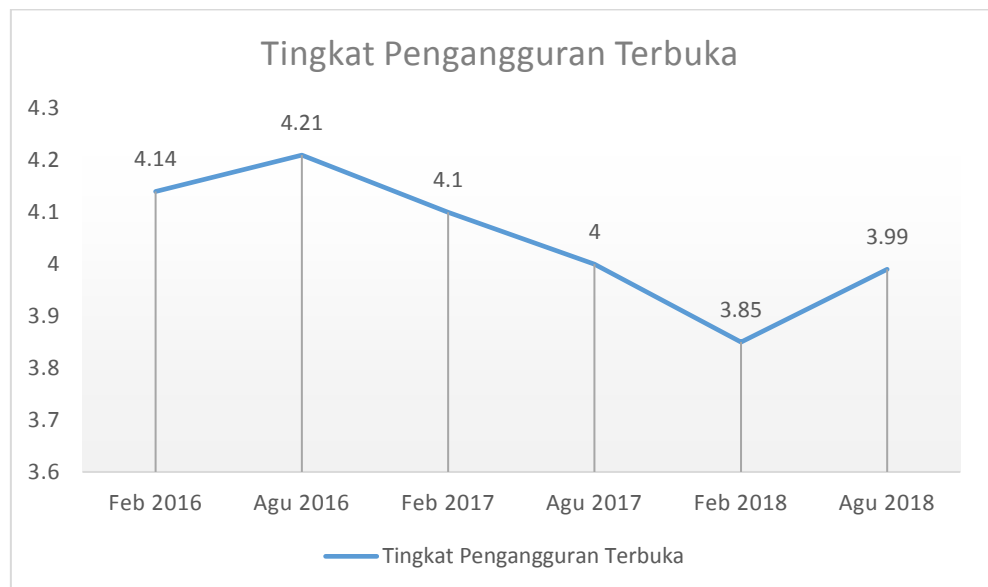
Target Presentase Penduduk Miskin pada Indikator Kinerja Utama Pembangunan tahun 2018 sebesar 11,50-11,20 persen, berdasar data Badan Pusat Statistik untuk periode September 2017-maret 2018 jumlah penduduk miskin turun menjadi sebesar 10,98 persen. Faktor yang berperan dalam penurunan ini adalah adanya panen raya dimana Jawa Timur merupakan lumbung padi nasional, rendahnya inflasi sebesar 1,97 persen dibanding periode sebelumnya sebesar 2,59 persen, dan indeks upah buruh tanaman pangan mengalami kenaikan sebesar 5,51 persen.



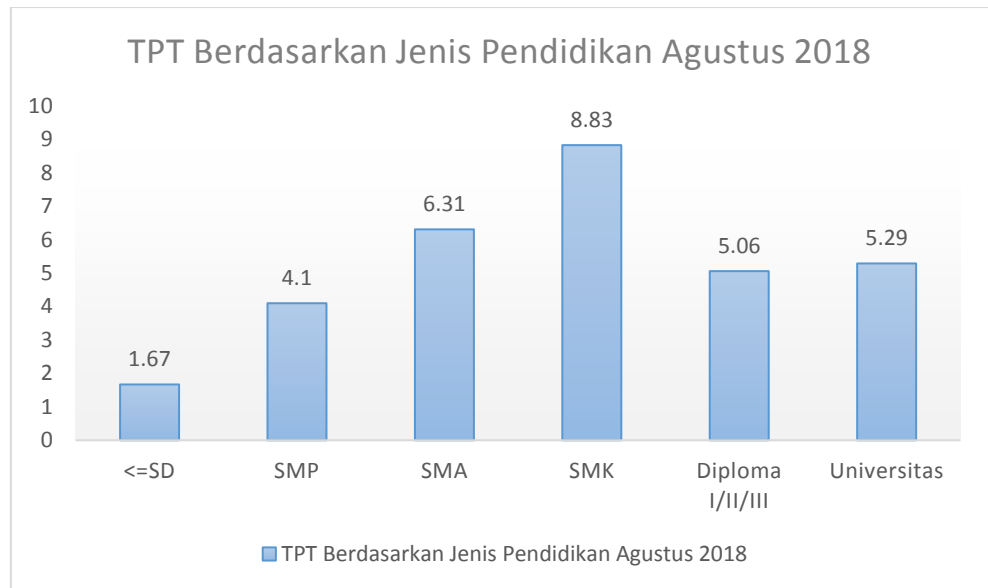
Grafik B.2. Penurunan Presentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa TImur periode Maret 2015 – Maret 2018

Pada tahun 2018 ditargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,08-3,99 persen, berdasar data Badan Pusat Statistik TPT Jawa Timur pada Agustus 2018 sebesar 3,99 persen mengalami penurunan 0,01 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 4,00 persen.

Dilihat dari tingkat pendidikan, SMK mendominasi angka TPT di Jawa Timur sebesar 8,83 persen, kemudian SMA sebesar 6,31 persen dan universitas sebesar 5,29 persen. Grafik lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah.



Grafik B.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa TImur periode Februari 2016 – Agustus 2018



Grafik B.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa TImur berdasarkan Jenis Pendidikan periode Februari 2016 – Agustus 2018

B.2. Kebijakan Fiskal/Keuangan

Dengan menyeleraskan prioritas dan sasaran kebijakan nasional, serta prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur, maka dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) dalam rangka mendukung capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
3. Pengelolaan belanja daerah dapat memenuhi aturan earmarking untuk bidang kesehatan dan pendidikan, dimana anggaran pendidikan sekitar 20% dan kesehatan sekitar 10%;
4. Belanja daerah dikelola untuk penyelenggaraan program-program prioritas yang masuk di dalam urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;

5. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian;
6. Belanja daerah yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
7. Belanja daerah harus mampu memenuhi program-program yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD;
8. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewangan Pemerintah Provinsi. Belanja sosial dan belanja hibah harus mengacu pada aturan yang berlaku. Selain itu, koordinasi dengan kabupaten/kota sampai dengan pemerintahan desa perlu ditingkatkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sehingga hibah dan bantuan sosial dapat tepat sasaran, efektif, dan efisien;
9. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
10. Untuk akuntabilitas dan transparansi anggaran, maka kebijakan belanja hibah diarahkan kepada badan /lembaga /organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat yang berbadan hukum. Hal ini untuk menjaga kepastian pertanggungjawaban belanja daerah dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
11. Dalam upaya mendukung efisiensi dan efektifitas belanja daerah, maka perlu melaksanakan efisiensi belanja non fisik. Efisiensi belanja non fisik diarahkan pada efisiensi honorarium PNS, dimana

penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan;

12. Dalam melaksanakan agenda reformasi di bidang keuangan negara khususnya berkaitan dengan pola pengelolaan keuangan dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja, dengan cara mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Provinsi Jawa Timur efektif sejak Tahun Anggaran 2018 menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Perangkat Daerah yang telah dinilai memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif sebagai PPK-BLUD.

Adapun sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran kinerja tiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur;
- b. Meningkatnya kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- c. Meningkatnya kualitas data pegawai ASN yang akurat;
- d. Meningkatnya profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Di dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 terdapat salah satu agenda pokok yang tertuang, yaitu peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Untuk dapat mengimplementasikan agenda tersebut Badan Kepegawaian Daerah perlu menyusun kebijakan-kebijakan strategis dan menerjemahkannya kedalam program-program prioritas, adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program penataan dan pelayanan pegawai ASN;
- b. Program pengembangan aparatur sipil negara (ASN);
- c. Program penyelenggaraan peningkatan disiplin, penilaian kinerja, pendayagunaan serta kesejahteraan aparatur;
- d. Program penyelenggaraan pengembangan sumber daya KORPRI;

- e. Program perencanaan, pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN.

Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp42.513.908.119,00. Seiring dengan perkembangan keadaan, terjadi perubahan anggaran dimana bertambah sebesar Rp7.688.322.967,00 menjadi Rp50.202.231.086,00. Komposisi perubahan ditunjukkan tabel berikut ini :

No.	JENIS BELANJA	ANGGARAN APBD BKD TA 2018	ANGGARAN PERUBAHAN APBD BKD TA 2018	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.824.298.119,00	15.774.621.086,00	(2.049.677.033,00)
1.1	Belanja Pegawai	17.824.298.119,00	15.774.621.086,00	(2.049.677.033,00)
2	BELANJA LANGSUNG	24.689.610.000,00	34.427.610.000,00	9.738.000.000,00
2.1	Belanja Pegawai	6.474.274.000,00	8.351.276.000,00	1.877.002.000,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.919.309.000,00	22.796.807.000,00	6.877.498.000,00
2.3	Belanja Modal	2.296.027.000,00	3.279.527.000,00	983.500.000,00
	TOTAL BELANJA DAERAH	42.513.908.119,00	50.202.231.086,00	7.688.322.967,00

Tabel B.1. Komposisi Anggaran dan Anggaran Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jawa Timur TA 2018

Adanya perubahan anggaran APBD 2018 disebabkan oleh bertambahnya kegiatan terkait pelaksanaan program prioritas dan program pendukung di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, seperti dalam rangka pelaksanaan rangkaian acara Hari Ulang Tahun Korpri ke-47 dilaksanakan berbagai lomba dan kegiatan MTQ Korpri ASN Jawa Timur, bertambahnya keperluan dalam penyediaan sarana dan prasarana kantor yang dimaksimalkan untuk menunjang efektifitas kerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan juga terkait dengan kegiatan nasional yaitu rekrutmen aparatur sipil negara 2018.

C. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

C.1. Indikator/Target Kinerja Keuangan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah menyusun rencana Kerja tahun 2018 yang memuat tentang indikator-indikator dan target capaian kinerja. Rencana kerja ini mengacu kepada Rencana Strategis Badan Kepegawaian daerah 2014-2019.

Adapun indikator kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ASN terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	85%
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Presentase pegawai yang puas terhadap pelayanan kantor	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	135 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	135 unit
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%
	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah konsultasi	60 kali
	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	124 orang
		Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	124 orang
4	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	6 dok
	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	5 dok
	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	14 dok
5	Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendetayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur	Jumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang mempunyai nilai SKP (minimal) Baik	51.154
	Penegakan Disiplin	Jumlah laporan kegiatan penegakan disiplin	7 dok
	Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja	Jumlah dokumen laporan kegiatan kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja	6 dok
	Pemberdayaan ASN	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ASN	6 dok

6	Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Korpri	Persentase peningkatan pembinaan anggota KORPRI	87%
	Penguatan Jiwa Korsa	Jumlah laporan rangkaian HUT KORPRI	1 lap
		Jumlah laporan Paduan suara	1 lap
		Jumlah laporan pelatihan pleton upacara	1 lap
	Perlindungan, Advokasi Hukum dan Kesejahteraan anggota Korpri	Persentase fasilitasi penanganan perkara anggota KORPRI yang bermasalah hukum dan ditindaklanjuti	85%
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Jumlah laporan advokasi hukum dan penanganan perkara anggota KORPRI	1 lap
		Jumlah bantuan peralatan sekolah bagi putra putri keluarga anggota KORPRI	250 org
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Sekretariat KORPRI	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran UPT Sekretariat KORPRI	100%
7	Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN	Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi	98%
		IKM pelayanan Kepegawaian	85%
	Penataan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kompetensi	Persentase rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim Baperjakat	100%
		Persentase pengisian jabatan lowong secara terbuka	100%
		Persentase penyelesaian proses PAK jabatan fungsional tertentu	100%
	Pelayanan kenaikan pangkat	IKM kenaikan pangkat bagi pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/Kab-kota di Provinsi Jatim	85%
	Pelayanan pensiun dan perpindahan	Persentase pendistribusian pegawai sesuai dengan perencanaan dan formasi	85%
		IKM pelayanan pensiun dan perpindahan pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim/Kab-kota di Provinsi Jawa Timur	85%
8	Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN	Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	98%
	Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	Persentase database kepegawaian yang lengkap	98%
	Perencanaan kepegawaian dan formasi	Jumlah dokumen kegiatan perencanaan kepegawaian dan formasi	2 dok
	Seleksi Rekrutmen Pegawai yang Transparan dan Bebas KKN	Persentase peserta yang lolos seleksi administrasi pendaftaran pegawai ASN dan Non ASN	100%
		Jumlah laporan kegiatan fasilitasi penerimaan calon praja IPDN	1 lap
		Jumlah dokumen penyusunan bank soal CAT	1 dok
		Jumlah pelaksanaan ujian ASN pelamar umum dan Non ASN	1 kali/kegiatan
9	Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Persentase pegawai ASN yang memenuhi syarat untuk ujian kompetensi	90%

Pembinaan Karir	Jumlah dokumen pelaporan kegiatan pembinaan karir	6 dok
	Persentase SKPD yang telah menyusun dan menerapkan pola karir	80%
	Persentase penyelesaian proses izin belajar dan tugas belajar	100%
Penilaian Kompetensi	Jumlah dokumen kegiatan pengembangan kompetensi	7 dok
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah dokumen kegiatan penyusunan penetapan standar kompetensi jabatan dan pola karir	4 dok

Tabel C.1. Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

C.2. Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Gambaran umum tentang kinerja keuangan Badan kepegawaian Daerah tahun anggaran 2018 dalam merealisasikan pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan akan disajikan dalam tabel-tabel dibawah ini.

a. Target dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	21.362.400,00

Tabel C.2. Komparasi Target dan Realisasi Pendapatan TA 2018

Pada tahun 2018 terdapat realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp21.362.400,00 terdiri dari; 1. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp11.360.400,00; dan 2. Pendapatan Dari Pengembalian Pembayaran Belanja Rp10.002.000,00.

Perbandingan Pendapatan-LRA pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%
Lain-lain PAD yang Sah	21.362.400,00	13.965.200,00	152,97

Tabel C.3. Komparasi Realisasi Pendapatan TA 2017 dan TA 2018

b. Target dan Realisasi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan. Pada Tahun Anggaran 2018 BKD Provinsi Jawa Timur Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp50.202.231.086,00 dan

terrealisasi sebesar Rp46.655.692.471,00. Untuk rincian bisa dilihat pada tabel berikut.

Uraian	APBD Perubahan BKD TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
Belanja Pegawai	24.125.897.086,00	22.412.960.633,00	22.211.082.673,00
Belanja Barang dan Jasa	22.796.807.000,00	21.092.859.988,00	16.931.838.688,00
Belanja Modal	3.279.527.000,00	3.149.871.850,00	2.193.106.500,00

Tabel C.4. Target dan Realisasi Belanja BKD Prov Jatim TA 2018

Jika diperbandingkan Belanja TA 2018 dengan realisasi Belanja TA 2017 terdapat kenaikan disemua komponen belanja. Belanja pegawai mengalami peningkatan 0,9 persen atau sebesar Rp201.877.960,00, Belanja barang dan jasa mengalami kenaikan 24,57 persen atau sebesar Rp4.161.021.300,00 dan belanja modal terdapat kenaikan 43,62 persen atau sebesar Rp956.765.350,00.

C.3. Hambatan dan Kendala

Dalam pelaksanaan realisasi anggaran terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja keuangan, antara lain:

- a. Ada beberapa kegiatan yang harus menunggu koordinasi dari pejabat yang berwenang terkait dengan penyelenggaraannya;
- b. Kurangnya koordinasi terkait rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Badan Kepegawaian Negara, sehingga terjadi perbedaan persepsi terkait pembiayaan belanja terkait pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. Terdapat sisa mati terkait pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa.

C.4. Solusi dan Saran

Adapun solusi yang bisa diberikan terkait dengan hambatan dan kendala yang terjadi adalah;

- a. Memastikan pelaksanaan kegiatan dengan pejabat yang berwenang sebelum dilaksanakannya penyusunan rencana anggaran, agar tidak terjadi kelebihan dalam penganggaran;

- b. Mengkaji peraturan-peraturan terkait dengan manajemen ASN serta berkoordinasi dengan instansi yang berwenang terkait pengalokasian anggaran rekrutmen ASN;
- c. Memperbanyak referensi terkait survey harga barang.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI

D.1. Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang secara teknis dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan entitas akuntansi yaitu OPD sebagai unit pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan yang ditujukan kepada entitas pelaporan dalam rangka konsolidasi laporan keuangan.

Sebagai entitas akuntansi, Laporan Keuangan yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur meliputi:

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran

Laporan Pelaksanaan Anggaran disusun menggunakan basis kas, artinya transaksi keuangan diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Yang termasuk jenis laporan ini antara lain : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah hanya menyajikan LRA, dimana LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan.

2. Laporan Finansial

Laporan finansial terdiri dari Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Laporan finansial dibuat dengan menggunakan basis akrual, yaitu transaksi keuangan diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayar. perbedaan pencatatan antara Laporan Finansial dan Laporan Pelaksanaan Anggaran menyebabkan Laporan Finansial disusun dengan

menggunakan sistem akuntansi yang berbeda mulai dari proses penjurnalan, posting ke buku besar sampai dengan proses laporan.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan penjelasan naratif atas rincian dari angka yang tertera dalam LRA dan Neraca, mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas akuntansi serta informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar.

D.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sebagai entitas akuntansi, kami mengacu kepada kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh entitas pelaporan. Dalam hal ini kebijakan akuntansi mengacu kepada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual yang mana pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima oleh SKPD serta Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadi pengeluaran oleh SKPD.

D.3. Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Pelaporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pencatatan pendapatan dilakukan dengan menggunakan asas bruto, yakni pendapatan diakui sebesar hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran atas perolehan pendapatan tersebut. Pelaksanaan terkait pendapatan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas, dimana kas yang masuk ke kas daerah yang nyata-nyata telah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari sumber pendapatan.

Pendapatan diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah. Pencatatan dilakukan berdasarkan nominal STS/nota kredit.

2. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menggunakan basis akrual, pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

- b. Belanja dan Beban

Pencatatan pengeluaran dibedakan menjadi 2 (dua); belanja dan beban.

1. Belanja

Belanja digunakan dalam pencatatan untuk LRA dimana belanja diakui ketika sudah terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Belanja diakui ketika diterbitkan SP2D LS dan adanya aliran kas keluar oleh bendahar pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

2. Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban

diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

c. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur terdiri dari:

- Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2018 berupa kas dan setara kas, dan persediaan.

Kas dan Setara Kas

- Kas dan setara kas yang terdapat di Badan Kepegawaian Daerah berupa Kas di Bendahara Pengeluaran, yang merupakan sejumlah uang yang berada di brankas atau di rekening bank bendahara pengeluaran/pembantu yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang telah dianggarkan dalam APBD yang bersumber dari SP2D UP/GU/TU/LS.
- Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal, disajikan sebesar nilai rupiah tersebut.
- Pengukuran kas di bendahara pengeluaran/pembantu dicatat sebesar saldo nilai tunai yaitu senilai selisih antara total SP2D UP/GU/TU dengan pengesahan SPJ dan penyeteroran sisa kas ke Kas Daerah.

Persediaan

- Merupakan aset berwujud berupa barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau barang yang disimpan

untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

- Persediaan diakui atas barang yang telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) dan perhitungan nilainya menggunakan metode FIFO (First-In-First-Out).

- Aset Tetap

Merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kegiatan pemerintah. Aset tetap yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2018 berupa peralatan dan mesin yang diakui ketika hak kepemilikan atas peralatan dan mesin tersebut telah berpindah yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

Penurunan nilai aset sebagai akibat dari adanya penyusutan diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat dalam Laporan Operasional.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Atas penghapusan aset tetap diakui mengurangi nilai aset tetap di neraca sebesar nilai buku aset tetap.

- Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset tidak berwujud yang dikelola sampai dengan tahun anggaran 2018 ini berupa software.

Aset tidak berwujud dinilai sebesar harga perolehan aset yang dicatat pada saat BAPP atas pengadaan barang dan jasa atau pengesahan SPJ atas belanja modal non fisik diterbitkan dan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisir.

- Aset Lain-lain

Pos yang digunakan untuk menampung aset tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Aset tetap yang rusak dan tidak dapat digunakan dimaksudkan untuk dihentikan penggunaannya diklasifikasikan sebagai aset lain-lain, penghapusan aset lain-lain diakui pada saat Berita Acara Pemusnahan/ Berita Acara Serah Terima diterbitkan.

D.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan mengacu dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada prinsipnya tidak mengandung permasalahan yang menyimpang dan sulit untuk diterapkan. Pilihan yang telah ditetapkan sesuai dengan penyusunan rencana anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah melalui standardisasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

E. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

E.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan

E.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

Digunakan untuk menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Pada entitas akuntansi Badan Kepegawaian Daerah, laporan realisasi anggaran menyajikan informasi mengenai pendapatan-LRA, belanja, dan surplus/defisit-LRA.

Pada tahun anggaran 2018 Badan Kepegawaian Daerah mendapat alokasi anggaran perubahan sebesar Rp50.202.231.086,00. Adapun komposisinya adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	Belanja Daerah	50.202.231.086,00
5 1	Belanja Tidak Langsung	15.774.621.086,00
5 1 1	Belanja Pegawai	15.774.621.086,00
5 2	Belanja Langsung	34.427.610.000,00
5 2 1	Belanja Pegawai	8.351.276.000,00
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	22.796.807.000,00
5 2 3	Belanja Modal	3.279.527.000,00

Tabel E.1. Komposisi Anggaran Tahun 2018

E.1.1.1. Pendapatan-LRA

Realisasi pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp21.362.400,00. Realisasi ini seluruhnya berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan-LRA TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp7.397.200,00 atau 44,85 persen dibandingkan pada TA 2017. Perbandingan pendapatan-LRA dapat dilihat pada table berikut.

Uraian	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	Kenaikan	persen tase
Pendapatan-LRA	21.362.400,00	13.965.200,00	7.397.200,00	52,96

Tabel E.2. Perbandingan Realisasi Pendapatan-LRA TA 2017-2018

Realisasi pendapatan-LRA TA 2018 berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp11.360.400,00;
- b. Pendapatan Dari Pengembalian Pembayaran Belanja sebesar Rp10.002.000,00.

E.1.1.2. Belanja

Sampai dengan akhir periode pelaporan tahun anggaran 2018 realisasi anggaran mencapai Rp46.655.692.471,00 atau sebesar 92,94 persen dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Daerah	50.202.231.086,00	46.655.692.471,00	92,94
Belanja Tidak Langsung	15.774.621.086,00	14.910.464.633,00	94,52
Belanja Pegawai	15.774.621.086,00	14.910.464.633,00	94,52
Belanja Langsung	34.427.610.000,00	31.745.227.838,00	92,21
Belanja Pegawai	8.351.276.000,00	7.502.496.000,00	89,83
Belanja Barang dan Jasa	22.796.807.000,00	21.092.859.988,00	92,52
Belanja Modal	3.279.527.000,00	3.149.871.850,00	96,04

Tabel E.3. Realisasi Per Jenis Belanja TA 2018

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp5.319.664.610,00 atau 12,86 persen dibanding dengan realisasi belanja TA 2017. Perbandingan realisasi anggaran tahun 2018 dan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Uraian	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Daerah	46.655.692.471,00	41.336.027.861,00	5.319.664.610,00	12,86
Belanja Tidak Langsung	14.910.464.633,00	16.623.906.338,00	(1.713.441.705,00)	(10,30)
Belanja Pegawai	14.910.464.633,00	16.623.906.338,00	(1.713.441.705,00)	(10,30)
Belanja Langsung	31.745.227.838,00	24.712.121.523,00	7.033.106.315,00	28,46
Belanja Pegawai	7.502.496.000,00	5.587.176.335,00	1.915.319.665,00	34,28
Belanja Barang dan Jasa	21.092.859.988,00	16.931.838.688,00	4.161.021.300,00	24,57
Belanja Modal	3.149.871.850,00	2.193.106.500,00	956.765.350,00	43,62

Tabel E.4. Perbandingan Realisasi Per Jenis Belanja TA 2018 dan TA 2017

Perbedaan anggaran dan pencapaian realisasi TA 2018 terjadi dikarenakan:

- 1) Ada beberapa kegiatan yang harus menunggu koordinasi dari pejabat

yang berwenang terkait dengan penyelenggaraannya, seperti kegiatan Baperjakat dan Pelantikan Pejabat; 2) Kurangnya koordinasi terkait kegiatan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Badan Kepegawaian Negara, sehingga terjadi perbedaan persepsi mengenai pembiayaan belanja kegiatan; dan 3) Terdapat sisa mati terkait pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa.

Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dapat diklasifikasikan menurut unit bidang, program dan jenis belanja.

1. Belanja Badan Kepegawaian Daerah Menurut Unit Bidang

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2018 menurut unit bidang dapat dilihat pada tabel 5.5. Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi dengan pengeluaran terbesar terdapat pada bidang Sekretariat yakni sebesar Rp 12.521.281.354,00.

Unit Bidang	Pagu	Realisasi	%
Sekretariat	12.878.705.000,00	12.521.281.354,00	97,22
Mutasi	3.000.000.000,00	2.834.191.798,00	94,47
Pengembangan	2.800.000.000,00	2.722.310.010,00	97,23
P3Dasi	8.163.000.000,00	6.110.733.322,00	74,86
Disiplin, Kesejahteraan dan Pendayagunaan Aparatur	2.550.000.000,00	2.544.156.039,00	99,77
UPT Sekretariat Korpri	5.035.905.000,00	5.012.555.315,00	99,54

Tabel E.5. Realisasi Belanja Menurut Unit Bidang TA 2018

2. Belanja Badan Kepegawaian Daerah Menurut Program

Rincian anggaran dan realisasi per progam dapat dilihat pada tabel 5.6. dibawah ini.

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	15.774.621.086,00	14.910.464.633,00	94,52
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.375.581.148,00	3.246.855.591,00	96,19
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.673.863.695,00	6.558.682.170,00	98,27
4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	2.313.010.157,00	2.207.907.355,00	95,46
5	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	516.250.000,00	507.836.238,00	98,37
6	Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur	2.550.000.000,00	2.544.156.039,00	99,77
7	Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Korpri	5.035.905.000,00	5.012.555.315,00	99,54
8	Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN	3.000.000.000,00	2.834.191.798,00	94,47
9	Program Perencanaan, Pengolahan	8.163.000.000,00	6.110.733.322,00	74,86

	sistem informasi data dan pengadaan ASN			
10	Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	2.800.000.000,00	2.722.310.010,00	97,23

Tabel E.6. Realisasi Belanja Menurut Program TA 2018

3. Belanja Badan Kepegawaian Daerah Menurut Jenis Belanja
- Realisasi menurut jenis belanja dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu; 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja barang dan Jasa; 3. Belanja Modal. Untuk rincian anggaran dan realisasi, perbandingan antara TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat di tabel-tabel di bawah ini.

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	24.125.897.086,00	22.412.960.633,00
2	Belanja Barang dan Jasa	22.796.807.000,00	21.092.859.988,00
3	Belanja Modal	3.279.527.000,00	3.149.871.850,00
	Jumlah Belanja Daerah	50.202.231.086,00	46.655.692.471,00

Tabel E.7. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2018

Rincian per jenis belanja dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA 2018 sebesar Rp22.412.960.633,00 dibanding TA 2017 naik sebesar Rp201.877.960,00 atau sebesar 0,9 persen. Perbandingan belanja pegawai TA 2018 dan TA 2017 bisa dilihat di tabel berikut.

Uraian	TA 2018	TA 2017
Gaji dan Tunjangan	6.914.368.013,00	8.997.127.413,00
Tambahan Penghasilan PNS	7.996.096.620,00	7.626.778.925,00
Honorarium PNS/Non PNS	4.909.635.000,00	3.898.720.335,00
Uang Lembur	2.592.861.000,00	1.688.456.000,00
JUMLAH	22.412.960.633,00	22.211.082.673,00

Tabel E.8. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017

Kenaikan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2018 dikarenakan adanya kegiatan rekrutmen CPNS 2018 yang

mempunyai alokasi anggaran lebih besar karena menggunakan jumlah SDM yang banyak sebagai pendukung terselenggaranya kegiatan dengan baik dan lancar.

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2018 sebesar Rp21.092.859.988,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.161.021.300,00 atau 24,57 persen dibandingkan dengan TA 2017. Perbandingan belanja barang dan jasa TA 2018 dan TA 2017 bisa dilihat di tabel berikut.

Uraian	TA 2018	TA 2017
Belanja Bahan Pakai Habis	2.282.565.084,00	2.522.575.286,00
Belanja Utilitas	0,00	71.101.496,00
Belanja Bahan/Material	8.969.000,00	0,00
Belanja Jasa	3.431.783.636,00	2.900.682.910,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	23.571.000,00	2.235.000,00
Belanja Service Kendaraan Bermotor	134.480.685,00	11.905.162,00
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan	1.949.984.146,00	1.752.291.427,00
Belanja Sewa	1.562.002.920,00	337.980.936,00
Belanja Makanan dan Minuman	2.074.014.930,00	1.361.303.933,00
Belanja Pakaian	329.120.550,00	336.204.485,00
Belanja Perjalanan Dinas	5.317.815.237,00	4.143.847.403,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis	353.800.000,00	254.990.000,00
Belanja Pemeliharaan	3.272.785.300,00	3.094.453.650,00
Belanja Jasa Konsultansi	0,00	14.993.000,00
Uang/Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat pemenang perlombaan/kompetisi/kejuaraan	351.967.500,00	0,00
Jumlah	21.092.859.988,00	16.931.838.688,00

Tabel E.9. Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2018 dan TA 2017

Kenaikan belanja barang dan jasa TA 2018 disebabkan oleh:

1. Kebutuhan belanja sewa untuk penyelenggaraan rangkaian acara/kegiatan dalam rangka memperingati HUT Korpri ke-47;

2. Belanja barang/jasa dalam rangka kegiatan seleksi rekrutmen CPNS tahun 2018.

c. Belanja Modal

Realisasi belanja Modal TA 2018 sebesar Rp2.193.106.500,00 dibanding TA 2016 naik sebesar Rp1.463.836.000,00 atau sebesar 200,72 persen. Perbandingan belanja modal TA 2017 dan TA 2016 bisa dilihat di tabel berikut.

URAIAN	TA 2018	TA 2017
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor	2.094.981.750,00	1.350.788.500,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	39.930.000,00	155.303.500,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	541.612.500,00	287.457.500,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	24.970.000,00
Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor/tempat kerja/Tempat Tinggal	398.932.600,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian tugu titik kontrol dan rambu-rambu	0,00	64.955.000,00
Belanja Modal Software	74.415.000,00	309.632.000,00
Jumlah	3.149.871.850,00	2.193.106.500,00

Tabel E.10. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017

Kenaikan belanja modal TA 2018 disebabkan oleh:

1. Pembelian personal komputer untuk kebutuhan pelaksanaan tes CPNS menggunakan aplikasi CAT BKN;
2. Pembangunan sarana dan prasarana kantor berupa parkir mobil pegawai dan ruang *asesment center*.

E.1.2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Penjelasan mengenai masing-masing pos di neraca diuraikan sebagai berikut.

E.1.2.1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Aset Badan Kepegawaian Daerah terbagi dalam;

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017(Rp)
Aset Lancar	3.704.800,00	21.177.585,00
Aset Tetap	6.605.070.565,00	4.943.022.538,00
Aset Lainnya	1.131.186.778,00	1.155.614.614,00
TOTAL	7.739.962.143,00	6.119.814.737,00

Tabel E.11. Perbandingan Nilai Aset per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa aset Badan Kepegawaian Daerah meningkat sebesar Rp1.620.147.406,00 atau sebesar 26,74 persen. Peningkatan ini seluruhnya berasal dari pembelian belanja modal selama tahun 2018.

E.1.2.1.1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika berupa kas dan setara kas dan diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar pada Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2018 hanya terdiri dari komponen persediaan.

E.1.2.1.1.1. Persediaan

Nilai persediaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.704.800,00 turun sebesar Rp17.472.785,00 dibanding dengan saldo per 31 Desember 2017. Adapun rincian dan perbandingan jumlah persediaan adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
Persediaan Alat Tulis Kantor	1.944.800,00	2.629.935,00
Persediaan Cetak dan/atau Penggandaan	1.760.000,00	18.547.650,00
JUMLAH	3.704.800,00	21.177.585,00

Tabel E.12. Perbandingan Nilai Aset per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017

E.1.2.1.2. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan yang perolehannya dimaksudkan bukan untuk dijual dan

digunakan untuk operasional entitas. Adapun aset tetap Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

E.1.2.1.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp16.907.449.393,00 meningkat sebesar Rp2.432.374.250,00 atau sebesar 16,8 persen dari tahun 2017. Rincian perbandingan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat di tabel berikut.

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Alat-alat Bantu	234.300.000,00	234.300.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	3.501.626.043,00	3.745.776.043,00
Alat Kantor	1.453.152.380,00	1.376.366.880,00
Alat Rumah Tangga	3.253.721.370,00	2.689.741.470,00
Komputer	5.963.002.050,00	4.553.830.700,00
Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	606.369.250,00	606.369.250,00
Alat Studio	1.326.609.900,00	799.847.400,00
Alat Komunikasi	568.268.400,00	468.443.400,00
Alat Keamanan	400.000,00	400.000,00
TOTAL	16.907.449.393,00	14.475.075.143,00

Tabel E.13. Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017

Penambahan nilai peralatan dan mesin diperoleh dari pembelian belanja modal TA 2018. Adapun pembelian ini dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional kantor, penyediaan personal komputer bagi pelaksanaan rekrutmen CPNS dan juga untuk mendukung kinerja aplikasi e-Master berupa pembelian *storage server*.

E.1.2.1.2.2. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar 398.932.600,00 turun sebesar Rp214.948.600,00 dari tahun 2017.

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	398.932.600,00	548.926.200,00
Bangunan Menara Telekomunikasi	0,00	64.955.000,00
TOTAL	398.932.600,00	613.881.200,00

Tabel E.14. Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Realisasi nilai gedung dan bangunan pada TA 2018 terdiri dari;

1. Pembangunan parkir mobil sebesar Rp173.427.100,00;
2. Pembangunan ruang asesment sebesar Rp225.505.500,00

E.1.2.1.2.3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jumlah Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp203.977.400,00 sama dengan tahun 2017. Untuk rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
Jaringan Air Minum	84.126.900,00	84.126.900,00
Jaringan Listrik	24.975.500,00	24.975.500,00
Jaringan Telepon	94.875.000,00	94.875.000,00
TOTAL	203.977.400,00	203.977.400,00

Tabel E.15. Perbandingan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

E.1.2.1.2.4. Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.622.300,00 sama dengan tahun 2017.

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Buku	1.672.300,00	1.672.300,00
Barang Bercorak Kebudayaan	4.950.000,00	4.950.000,00
TOTAL	6.622.300,00	6.622.300,00

Tabel E.16. Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

E.1.2.1.2.5. Akumulasi Penyusutan

Jumlah Akumulasi Penyusutan Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp11.525.792.328,00) meningkat sebesar (Rp1.169.258.823,00) dari tahun 2017. Untuk rincian akumulasi penyusutan dan perbandingan per 31 desember 2018 dan 31 desember 2017 dapat dilihat di tabel di bawah ini.

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.402.157.219,00)	(10.255.291.937,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(41.215.370,00)	(26.994.187,00)

Akumulasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	(75.797.439,00)	(67.625.081,00)
Akumulasi Aset Tetap Lainnya	(6.622.300,00)	(6.622.300,00)
TOTAL	(11.525.792.328,00)	(10.364.698.102,00)

Tabel E.17. Perbandingan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

E.1.2.1.3. Aset Lainnya

Aset lainnya yang terdapat di Badan Kepegawaian Daerah adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain. Aset tidak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

E.1.2.1.3.1. Aset tidak Berwujud

Jumlah Aset tidak berwujud Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp698.930.778,00 turun sebesar Rp24.427.836,00 dari tahun 2017.

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Aset tidak Berwujud	698.930.778,00	723.358.614,00

Tabel E.18. Perbandingan Aset tidak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Walaupun terjadi penurunan nilai aset tidak berwujud dibandingkan dengan periode TA 2017, Badan Kepegawaian Daerah selama TA 2018 merealisasikan Belanja Modal Software sebesar Rp74.415.000,00. Nilai aset tak berwujud pada neraca merupakan nilai buku setelah dikurangkan dengan akumulasi amortisasi.

E.1.2.1.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp432.256.000,00. Jumlah ini sama dengan periode per 31 Desember 2017. Untuk perbandingan nilai aset lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat di tabel di bawah ini.

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Aset Lain-lain	1.319.156.000,00	1.075.006.000,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(886.900.000,00)	(642.750.000,00)
Nilai Buku	432.256.000,00	432.256.000,00

Tabel E.19. Perbandingan Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Terdapat penambahan nilai Aset Lain-lain pada tahun 2018, karena dialihkannya aset tetap Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan ke aset lain-lain senilai Rp244.150.000,00

E.1.2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kualifikasi kewajiban yang terdapat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur adalah kewajiban jangka pendek. Pada neraca di akhir periode pelaporan terdapat utang beban.

E.1.2.2.1 Utang Beban

Jumlah Utang Belanja Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp6.221.800,00) naik sebesar (Rp726.603,00) dibanding per 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Utang belanja	(6.221.800,00)	(5.495.597,00)

Tabel E.20. Perbandingan Utang Beban per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Nilai utang tahun 2018 merupakan utang pembayaran air bulan desember sebesar Rp4.304.000,00 dan utang pembayaran telepon sebesar Rp2.187.800,00.

E.1.2.3. Ekuitas

Jumlah ekuitas kekayaan bersih Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp7.733.740.343,00. Perbandingan dengan saldo per 31 Desember 2017 adalah:

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Ekuitas	7.733.740.343,00	6.114.319.140,00

Tabel E.21. Perbandingan Nilai Ekuitas Per 31 Desember 2018 dan 2017

Rincian nilai ekuitas dan perbandingan dengan periode sebelumnya adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Ekuitas	6.114.319.140,00	5.044.056.360,00
Surplus/Defisit - LO	(45.014.908.868,00)	(40.251.799.881,00)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	46.634.330.071,00	41.322.062.661,00
JUMLAH	7.733.740.343,00	6.114.319.140,00

Tabel E.22. Perbandingan Nilai Rincian Ekuitas Per 31 Desember 2018 dan 2017

E.1.3. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

E.1.3.1. Pendapatan-LO

E.1.3.1.1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Jumlah Lain-lain PAD yang Sah-LO adalah sebesar Rp21.362.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	11.360.400,00
Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Belanja-LO	10.002.000,00
JUMLAH	21.362.400,00

Tabel E.23. Rincian Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2018

Dibandingkan dengan periode per 31 desember 2017 terdapat kenaikan sebesar Rp7.397.200,00 atau sebesar 52,97 persen.

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	21.362.400,00	13.965.200,00

Tabel E.24. Perbandingan Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

E.1.3.2. Beban Operasi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi dan/atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Jumlah beban operasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp45.036.271.268,00 dan Rp40.265.765.081,00 Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
Beban Pegawai	22.412.960.633,00	22.211.082.673,00	201.877.960,00	0,91
Beban Barang dan Jasa	21.111.058.976,00	16.753.543.007,00	4.357.515.969,00	26,01
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.512.251.659,00	1.296.999.970,00	211.112.258,00	16,23
JUMLAH	45.036.271.268,00	40.265.765.081,00	4.757.361.727,00	11,85

Tabel E.25. Perbandingan Beban Operasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

E.1.3.2.1. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Beban pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp22.421.960.633,00 dan Rp22.211.082.673,00. Rincian beban pegawai disajikan pada tabel 5.18 berikut:

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan-LO	6.914.368.013,00	8.997.127.413,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	7.996.096.620,00	7.626.778.925,00
Beban Honorarium PNS dan Non PNS-LO	4.909.635.000,00	3.898.720.335,00
Uang Lembur-LO	2.592.861.000,00	1.688.456.000,00
JUMLAH	22.412.960.633,00	22.211.082.673,00

Tabel E.26. Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Adapun rincian beban pegawai per unit bidang disajikan dalam tabel 5.19 berikut:

Unit Bidang	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Sekretariat	17.634.951.633,00	19.518.349.338,00
Mutasi	990.432.000,00	841.039.335,00
Pengembangan	578.610.000,00	477.987.000,00
P3Dasi	2.024.886.000,00	545.561.000,00
Disiplin, Kesejahteraan dan Pendayagunaan Aparatur	634.669.000,00	573.611.000,00
UPT Sekretariat Korpri	549.412.000,00	254.535.000,00
JUMLAH	22.412.960.633,00	22.211.082.673,00

Tabel E.27. Perbandingan Beban Pegawai per Unit Bidang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

E.1.3.2.2. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan pemakaian atau konsumsi barang dan jasa untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 21.104.837.176,00 dan Rp16.753.543.007,00. Rincian beban pegawai disajikan pada tabel 5.20 berikut:

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Beban Bahan Pakai Habis – LO	2.283.250.219,00	2.519.554.476,00
Beban Bahan/Material – LO	8.969.000,00	5.625.500,00
Beban Jasa – LO	3.432.509.839,00	2.972.453.885,00
Beban Premi - LO	23.571.000,00	22.356.000,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor – LO	134.480.685,00	119.058.162,00
Beban Cetak dan Penggandaan – LO	1.966.771.796,00	1.740.739.777,00
Beban Sewa – LO	1.562.002.920,00	337.980.936,00
Beban Makanan dan Minuman – LO	2.074.014.930,00	1.361.303.933,00
Beban Pakaian – LO	329.120.550,00	336.204.485,00
Beban Perjalanan Dinas – LO	5.317.815.237,00	4.143.847.403,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis - LO	353.800.000,00	254.990.000,00
Beban Pemeliharaan – LO	3.272.785.300,00	2.924.435.450,00
Uang/Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	351.967.500,00	0,00

Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan - LO		
Beban Jasa Konsultansi	0,00	14.993.000,00
JUMLAH	21.111.058.976,00	16.753.543.007,00

Tabel E.28. Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

E.1.3.2.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan dan amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.512.251.659,00 dan Rp1.301.139.401,00. Rincian beban penyusutan dan amortisasi disajikan pada tabel 5.21 berikut:

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.391.015.282,00	1.189.903.086,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.221.183,00	10.817.740,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.172.358,00	8.172.348,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	98.842.836,00	92.246.227,00
JUMLAH	1.512.251.659,00	1.301.139.401,00

Tabel E.29. Perbandingan Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

E.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

E.1.4.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp6.114.319.140,00 dan Rp4.167.823.812,00. Nilai ekuitas awal 2018 merupakan nilai saldo akhir ekuitas TA 2017.

E.1.4.2. Surplus/Defisit – LO

Jumlah Surplus/Defisit – LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah sebesar (Rp45.014.908.868,00) dan Rp(40.251.799.881,00).

E.1.4.3. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Jumlah Ekuitas untuk Dikonsolidasikan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp46.634.330.071,00 dan Rp41.322.062.661,00.

E.1.4.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Penyesuaian Ekuitas

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2018 tidak terdapat jumlah untuk komponen Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Penyesuaian Ekuitas, berbeda dengan TA 2017 dimana terdapat nilai sejumlah Rp876.232.548,00.

E.1.4.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah senilai Rp7.733.740.343,00 dan Rp6.114.319.140,00. Nilai tersebut didapat dari penjumlahan saldo awal ekuitas, Surplus/Defisit-LO, Ekuitas untuk dikonsolidasikan, dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Penyesuaian Ekuitas.

E.2. Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang dipakai entitas akuntansi mengacu kepada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mana merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

F. INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA

F.1. Penggantian Manajemen Pemerintahan selama tahun berjalan

Pada tahun 2018 terdapat beberapa pergantian manajemen baik di level Eselon II maupun Eselon III. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang sebelumnya dijabat oleh Siswo Heroetoto, SH, M.Hum, MM telah berakhir masa tugas pada 28 Februari 2018 digantikan oleh Plt. Anom Surahno, SH, M.Si dimana beliau merupakan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah akhirnya dijabat secara definitif oleh Anom Surahno, SH, M.Si per tanggal 29 Juni 2018 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/952/204/2018.

Jabatan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah yang sebelumnya dijabat oleh Drs. Abimanyu Ponco Atmojo I, M.M per tanggal 3 September 2018 kosong dikarenakan adanya promosi sebagai Kepala Bakorwil Bojonegoro. Sampai dengan 31 Desember 2018 posisi Sekretaris dijabat oleh Plt. Drs. Baktiyar Budiyo Ekwanto, MM yang mana merupakan Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah.

G. PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur disusun untuk menjelaskan lebih terinci terhadap Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang telah disusun guna menghindari kesalahpahaman penafsiran dan mempermudah pengguna dalam menterjemahkan angka-angka yang disajikan di dalamnya.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Karakteristik normatif yang diperlukan ada 4 (empat) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Selanjutnya pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kegiatan atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang saling melengkapi.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 dengan harapan bahwa penyelenggaraan APBD Tahun 2018 dan periode-periode berikutnya menjadi lebih baik serta memenuhi target indikator program kerja yang telah ditetapkan.